

**PERANAN NEGARA NON BLOK DALAM TERCIPTANYA
PERDAMAIAN DUNIA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

KOTOT PUGUH PRABOWO

NRP 2870146

NIRM 87. 7. 004. 12061. 10889

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1992**

Surabaya, 23 April 1992
Mahasiswa yang bersangkutan



KOBOT PUGUH PRASOWO

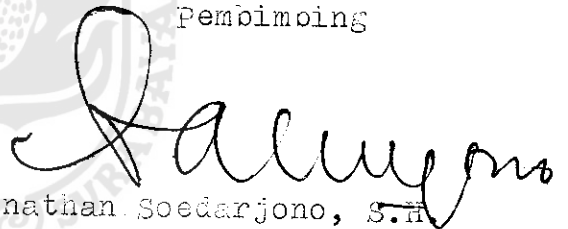
Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Jonathan Soedarjono, S.H.



Irta Windra Syahril, S.H., M.S.

Sejarah telah membuktikan bahwa sebab terbesar terjadinya pergolakan politik adalah akibat ekspansi negara-negara besar terhadap negara-negara berkembang. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, muncul dua negara adikuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Kedua negara adikuasa tersebut mempunyai ideologi yang saling bertolak belakang yaitu Amerika Serikat berideologi liberal, sedangkan Uni Sovyet berideologi komunis.

Pertentangan ideologi kedua negara tersebut membuat masing-masing negara merasa khawatir terhadap keamanan negaranya, sehingga berbagai jalan ditempuh untuk melindungi negaranya. Oleh karena itu, Amerika Serikat pada tahun 1947 bersama negara-negara Eropa Barat yang berideologi liberal mengadakan perjanjian pakta pertahanan militer yaitu NATO. Dan kemudian Uni Sovyet juga mengadakan perjanjian pakta pertahanan bersama negara-negara Eropa Timur yang berideologi komunis, yaitu Pakta Warsawa pada tahun 1955.

Sejak adanya NATO dan Pakta Warsawa itulah terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Setelah melihat situasi dunia yang semakin memprihatinkan dan menjurus kepada peperangan, maka muncullah kelompok negara yang tidak memihak salah satu blok yang ada. Kelompok tersebut kemudian menamakan gerakannya Gerakan Non Blok yang diprakarsai oleh lima negara, yaitu India, Ghana, Mesir,

Yugoslavia dan Indonesia. Negara Non Blok adalah sekelompok negara yang tidak tergabung dalam blok Barat dan blok Timur, serta berusaha membantu mencapai perdamaian dunia tanpa harus dipengaruhi oleh dua negara tersebut. Negara-negara Non Blok mengakui bahwa Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang diprakarsai oleh Indonesia yang melahirkan Deklarasi Bandung telah mengilhami lahirnya Gerakan Non Blok.

Sebagai salah satu anggota Gerakan Non Blok Indonesia juga berharap dapat ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Hal ini memang merupakan tujuan dari bangsa Indonesia yang dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Gerakan Non Blok, yaitu Gerakan Non Blok tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun Sekreta-

tariat, serta eksistensi Gerakan Non Blok dalam menyelesaikan sengketa internasional yang tidak jelas, dalam arti apakah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Gerakan Non Blok mempunyai kekuatan hukum dan moral sebagaimana yang dimiliki oleh Lembaga Arbitrasi, Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan ?. Sehingga tidaklah mengherankan bila dalam negara anggota Gerakan Non Blok itu sendiri masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri, seperti perang saudara di Yugoslavia, masalah Apartheid di Afrika, perselisihan 4 faksi di Kamboja dan lain sebagainya.

Meskipun kini pada tahun 1991 Perang Dingin sudah selesai, maka tidaklah berarti bahwa Gerakan Non Blok menjadi bubar tetapi justru hal ini dijadikan sebagai pedoman bahwa itu kesemuanya terjadi tidak lepas dari peranan Gerakan Non Blok. Oleh karena itu sudah saatnya bahwa eksistensi Gerakan Non Blok harus ditegakkan guna menhalaui setiap ancaman perang di dunia ini.

Bertolak dari adanya beberapa kendala tersebut di atas, maka saya akan membatasi permasalahan yang ada. Adapun permasalahan saya adalah : Sejauh manakah peranan Negara Non Blok dalam menciptakan perdamaian dunia ?.

Atas dasar inilah saya menyusun skripsi ini dengan judul "PERANAN NEGARA NON BLOK DALAM TERCIPTANYA PERDAMAIAN DUNIA". Dimana tujuan yang akan dicapai dalam

penelitian, yaitu : untuk memperoleh data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Disamping itu, penelitian tersebut dimaksudkan agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah melakukan penelitian, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengadakan pendekatan masalah dengan menggunakan cara yuridis normatif. Untuk itu data yang dipergunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang dilanjutkan dengan pengumpulan data dan pengolahan data yang menggunakan metode deduksi, yaitu pengolahan data yang bertolak dari hal yang umum menuju ke hal-hal yang khusus. Dalam arti bahwa Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional berlaku untuk semua permasalahan internasional dan secara khusus saya terapkan dalam permasalahan yang dihadapi oleh negara Non Blok. Dari hasil pengolahan data ini kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya dengan cara menggunakan sistematika perundang-undangan yang menjadi pangkal tolak bagi analisis terhadap permasalahan yang diajukan.

Waktu penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa fase yang disesuaikan dengan obyek penelitian, yaitu :

1. Persiapan : Desember 1991 - Januari 1992
2. Pengumpulan Data : Januari 1992 - Februari 1992

3. Analisis Data : Februari 1992 - Maret 1992

4. Laporan : Maret 1992 - April 1992

Dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa pendirian Gerakan Non Blok tidak semata-mata bertujuan untuk menghadapi Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Tetapi sejak awal berdirinya Gerakan Non Blok telah merumuskan rencana-rencananya yang bukan hanya meliputi masalah politik dan perlucutan senjata melainkan masalah ekonomi. Perkembangan Gerakan Non Blok selama 30 tahun telah menunjukkan sebagai wadah Dunia Ketiga atau negara berkembang, tidak hanya sekedar berperan sebagai kekuatan moral dan politik saja, melainkan juga semakin mampu untuk mengubah carak dan isi hubungan-hubungan internasional dengan melakukan dialog antara Utara-Selatan dan Selatan-Selatan.

Hasil dari rangkaian KTT Gerakan Non Blok senantiasa diperjuangkan dalam forum Gerakan Non Blok, maupun di forum OKI, atau PBB. Dalam forum PBB hasil yang dicapai yaitu usul mengadakan revisi terhadap jumlah anggota Dewan Keamanan dan ECOSOC agar sesuai dengan meningkatnya jumlah anggota.

Peran Gerakan Non Blok yang lain dalam bidang keamanan dan perdamaian dunia serta penyelesaian sengketa regional yaitu masalah Namibia, Afrika Selatan, Palestina, Kamboja dan lain sebagainya.

Dengan berakhirnya Perang Dingin yang tidak lepas

dari peranan Gerakan Non Blok dalam memperjuangkan azas, prinsip dan tujuannya. Indonesia sebagai salah satu anggota Gerakan Non Blok dalam menghadapi berbagai persoalan dunia dapat dilihat pada penyelesaian masalah di Kamboja yaitu dengan mengadakan Jakarta Informal Meeting (JIM), hal tersebut adalah sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, yang menyatakan :

Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus-menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsultasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam penyelesaian masalah di Kamboja Indonesia berperan sebagai mediator.

Dan sebagai kelanjutan JIM, Indonesia ditunjuk oleh dunia internasional menjadi ketua bersama Perancis dalam Paris International Conference on Cambodia (PICC), di Paris. Sebagai kelanjutan dari hasil perundingan tersebut, maka Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di bawah naungan PBB, yaitu pasukan Garuda XII di Kamboja. Pengiriman pasukan Garuda XII dan sebelumnya tersebut dilakukan oleh Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat serta politik luar negeri.

Dari semua uraian tersebut di atas, maka kesimpulan yang saya peroleh adalah bahwa setelah berakhirnya

Perang Dunia II, muncul dua negara adikuasa yang bertentangan ideologinya, yaitu Amerika Serikat dengan paham liberal dan Uni Sovyet dengan paham komunis. Pertentangan itu mengakibatkan dua negara adikuasa tersebut perlomba membuat senjata dan persekutuan militer.

Pada tahun 1947 Amerika Serikat dengan sekutunya yang berideologi liberal mengadakan perjanjian pakta pertahanan, yaitu NATO dan pada tahun 1955 Uni Sovyet dengan sekutunya yang berideologi komunis mengadakan pakta Warsawa. Dengan adanya NATO dan Pakta Warsawa menimbulkan pembagian dunia menjadi dua blok yang saling bermusuhan yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur dipimpin oleh Uni Sovyet.

Dengan adanya dua blok negara yang saling bermusuhan dan dapat mengakibatkan peperangan maka muncullah negara atau Gerakan Non Blok yaitu kelompok negara yang tidak memihak salah satu blok yang ada, bahkan bertujuan untuk meredakan persaingan dua negara adikuasa yang disebut Perang Dingin.

Peran Gerakan Non Blok dalam menciptakan perdamaian dunia dapat dilihat dalam usul untuk mengadakan penambahan jumlah anggota Dewan Keamanan, perlucutan senjata 1978, penyelesaian masalah regional, masalah Namibia, Afrika Selatan, Laos, Vietnam, dan lain sebagainya.

Peran Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa Konferensi Asia Afrika di Bandung yang mengilhami lahirnya Gerakan Non Blok, dalam menciptakan perdamaian dunia dapat dilihat pada penyelesaian konflik di Kamboja, baik melalui JIM, PICC maupun pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian dibawah naungan PBB.

